

menjelaskan bahwa absen yang harus diisi jurnalis adalah sebagai bukti penerimaan gratifikasi.

Usai mengisi absen, panitia memberikan gratifikasi yang telah dipersiapkan sebelumnya. Gratifikasi pada umumnya uang yang telah dikemas dalam bentuk amplop. Jika ada tambahan, *goodie bag* berisi berbagai aksesoris dan perlengkapan juga diberikan pada jurnalis. Sebagian panitia/humas sengaja menyembunyikan amplop di bagian yang sulit dijangkau agar tidak terlihat oleh umum.



Gambar 1



Gambar 2

Visual Proses Menerima Gratifikasi

Selain itu, pemberian amplop bisa diberikan langsung oleh narasumber pada jurnalis saat berjabat tangan usai wawancara. Cara ini

biasanya digunakan jurnalis ketika liputan khusus bersama narasumber. Situasi saat pemberian lebih privat, tidak diketahui oleh publik.

Ada sejumlah jurnalis yang sengaja mencari-cari gratifikasi bahkan berusaha mencari kesalahan narasumber. Hal ini seiring dengan menjamurnya media online yang tidak jelas manajemen redaksinya. Mulai dari jurnalis, redaktur, pimpinan redaksi hingga pimpinan umumnya hanya dipegang oleh satu orang. Karya jurnalistik dari media yang tidak jelas tersebut sulit dipertanggungjawabkan. Mereka kerap kali disebut sebagai wartawan bodrek.

Wartawan Bodrek tidak segan-segan mendatangi instansi atau narasumber untuk meminta sejumlah uang. Bahkan dengan cara yang tidak etis seperti mendobrak pintu, meja dan mengancam. Mereka biasanya bergerombol dan tidak masuk dalam keanggotaan Pokja.

Pada praktiknya, Pokja hadir tidak hanya sebagai media komunikasi antar jurnalis namun juga berperan menyuburkan gratifikasi. Sering melakukan liputan bersama membuat ikatan emosional diantara sesama anggota Pokja semakin erat. Saling bertukar berita apabila ketinggalan acara atau sedang sepi isu sudah biasa dilakukan. Pokja pada umumnya memiliki seorang ketua kelas. Dia yang akan mengorganisir seluruh informasi dan gratifikasi jika ada instansi/perusahaan yang ingin mengundang jurnalis.

Tidak semua jurnalis yang bisa masuk dalam lingkaran Pokja meski dari media mainstream. Ada proses yang harus dilalui jurnalis jika ingin berada dalam Pokja. Proses tersebut berkembang sesuai kesepakatan elite

Pokja sehingga masing-masing Pokja memiliki mekanisme yang berbeda-beda. Keputusan layak atau tidaknya seorang jurnalis masuk menjadi anggota ditentukan oleh ketua Pokja.

Beberapa proses yang harus dilalui diantaranya tidak mendapatkan informasi agenda liputan, mendapat informasi liputan palsu dan dikucilkan saat peliputan. Setelah melalui proses tersebut, jurnalis yang berniat masuk Pokja akan diundang bergabung di grup whatsapp. Selain sebagai silaturahmi sesama jurnalis, whatsapp digunakan untuk sarana penyebaran informasi agenda liputan dan menguatkan solidaritas sesama jurnalis.

Masing-masing instansi dalam Pokja sudah ada ketua kelasnya. Misalnya untuk provider Telkomsel, semua yang berkaitan dengan undangan jurnalis dan nominal yang akan dibagikan ditentukan oleh ketua kelas si A. Sedangkan si B menjadi ketua kelas untuk instansi Dishub Jatim. Penunjukan ketua kelas biasanya dipilih oleh sesama jurnalis, namun faktor kedekatan dengan instansi/perusahaan juga bisa menjadi alasan penunjukan.

Pokja melalui ketua kelas yang mengkoordinir pembagian amplop begitu terasa. Selain amplop, ketua kelas juga berusaha membangun kedekatan dengan jurnalis dengan membayarkan makan. Kedekatan yang dibangun ketua kelas dengan jurnalis juga dilakukan melalui media sosial (medsos). Saling melempar komentar apabila salah satu dari jurnalis yang memosting status atau foto. Ketua kelas terlihat berusaha mengayomi jurnalis agar ikatan emosional diantara keduanya terbangun.

Bagi jurnalis yang menolak gratifikasi atau terlalu kritis saat wawancara, maka Pokja menilai sok suci dan mengambil sikap tidak akan mengundang kembali jurnalis tersebut. Sebagai jurnalis anyar di sebuah pos liputan harus taat dan mengikuti seluruh aturan yang berlaku di Pokja termasuk mengenai gratifikasi. Ada dua pilihan yang diplomatis bagi jurnalis baru, tidak mendapat info agenda yang berimbas pada kurangnya pendapatan dengan idealisme terjaga atau menurunkan idealisme dengan menerima gratifikasi namun bertentangan dengan batin.

Apabila sudah menerima, beberapa saat kemudian jurnalis yang berperan sebagai ketua kelas menanyakan *link* berita untuk memastikan konten berita bermuatan positif sekaligus sebagai kompensasi bahwa jurnalis sudah menerima amplop.

Kalangan jurnalis dengan masing-masing Pokjanya menggunakan beberapa istilah tersendiri untuk membedakan agenda yang telah disediakan gratifikasi atau tidak. Namun adapula istilah yang berlaku umum di kalangan jurnalis Surabaya. Beberapa istilah yang lahir dari lingkungan jurnalis diantaranya, “liputan jelas”. Kata jelas disini untuk menegaskan sudah dipastikan ada amplopnya. Jadi kalimat liputan jelas sebetulnya ditambah amplop di bagian belakang menjadi liputan jelas (amplopnya) hanya saja tidak ditulis. Biasa dilafalkan dengan “*iki liputan jelas loh yo*”. Kalimat lain dalam makna yang sama diantaranya, “*ojok disebarno yo*” atau “*seng tak undang mek arek iki* (menyebut nama media)”. Tanpa bertanya, jurnalis yang diundang langsung paham maksud kalimat tersebut.

penyelenggara, beberapa jurnalis nekat datang karena tertarik dengan fasilitas gratifikasi. Keadaan seperti ini di lapangan memunculkan faksi-faksi, antara jurnalis yang diundang secara resmi dan jurnalis yang tidak diundang. Perlakuan humas pada jurnalis yang tidak diundang cenderung berbeda, seringkali harus pulang dengan tangan hampa sedangkan jurnalis yang diundang secara resmi akan mendapat fasilitas gratifikasi dengan paket lengkap dari penyelenggara acara

Agenda yang berlabel tbt lebih banyak disebar secara rahasia dan diam-diam. Hanya jurnalis tertentu sesuai permintaan penyelenggara acara atau hak prerogatif ketua kelas yang akan diundang. Pada level ini, Melati merasa perlu mengubah cara pandang dan menurunkan idealisme disesuaikan dengan budaya umum yang berlaku di lingkungan Pokja ekbis. Tidak ada jaminan jurnalis media mainstream seperti Tempo akan diundang, apabila tidak berbaur tetap dikucilkan.

Skema penyebaran undangan jenis tbc dari ketua kelas terdapat dua cara. Ketua kelas mengirim undangan tbc langsung ke jurnalis, tentu jumlahnya terbatas. Cara kedua yaitu ketua kelas mengirim pada beberapa orang kepercayaannya di Pokja kemudian disebar lagi pada jurnalis yang dituju. Cara terakhir sengaja dilakukan untuk memutus jejak sumber pemberi gratifikasi.

Proses observasi dan wawancara mendalam menemukan bahwa gratifikasi yang diterima oleh jurnalis beragam. Bentuk gratifikasi yang paling sering diterima adalah amplop. Selain praktis dan mudah dibawa,

bonus dari kantor ketika berhasil menggaet perusahaan/narasumber untuk memasang iklan menjadi hal yang menggiurkan. Terutama bagi jurnalis yang membutuhkan uang tambahan karena gajinya tidak cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari.

Ada semacam saling berlomba antar jurnalis untuk mendapatkan iklan sebanyak-banyaknya, bahkan sudah menjadi pemahaman umum jika jumlah uang hasil mencari iklan lebih besar dibanding gaji hasil menulis. Selain itu, juga ditemukan redaktur yang berperan sebagai ketua kelas.

Di TV9, Tidak banyak upaya untuk mencegah jurnalisnya tidak menerima gratifikasi. Larangan menerima pemberian berupa uang, barang atau fasilitas hanya sebatas imbauan lisan saja. Tidak ada fungsi pengawasan yang baik, meski tahu tentang praktik gratifikasi redaktur lebih banyak diam karena mengerti kondisi jurnalis saat meliput di lapangan.

Tempo sejak awal sudah ada aturan yang jelas bahwa jurnalis tidak boleh menerima pemberian dalam bentuk apapun. Ada tembok pemisah yang membelah redaksi dan marketing sehingga cerita bahwa jurnalis mencari iklan atau jurnalis diperintah liputan untuk kepentingan iklan tidak pernah terjadi di Tempo.

Jurnalis benar-benar di tempatkan dalam posisi yang netral, tidak boleh ada intervensi dari manapun. Liputan-liputan yang dilakukan jurnalis Tempo selalu berpijak pada kode etik jurnalistik, berpihak pada kepentingan publik dan leading dalam berita korupsi. Apabila ada laporan atau diketahui

dengan bukti jurnalis menerima pemberian maka sanksi pemecatan langsung diberikan.

Sebelum berangkat bertugas di lapangan, para jurnalis diingatkan oleh Redaktur agar tidak menerima apapun, bahkan diminta berhati-hati apabila mengisi absen dan membubuhkan tanda tangan. Ketika tanda tangan kehadiran harus dipastikan tidak ada uang sepeserpun yang diterima.

Tempo memberikan skema pengembalian lewat kantor apabila jurnalis tidak bisa mengembalikan gratifikasi dihadapan pemberinya secara langsung. Arahan yang pernah disampaikan redaktur Tempo, apabila mendapatkan undangan liputan dari humas instansi/perusahaan atau ketua kelas ada baiknya dihadiri. Upaya tersebut untuk menjaga nama baik Tempo dan hubungan dengan berbagai pihak. Namun tidak ada kewajiban menulis jika tidak ada sesuatu yang menarik dan memiliki manfaat bagi masyarakat luas.

Meski tidak ada aturan secara tertulis, Suara Surabaya (SS) melalui redaktur selalu mengingatkan agar berhati-hati dengan pemberian dari narasumber atau perusahaan. Nama basar SS berada dalam setiap perilaku jurnalis, artinya menerima gratifikasi dapat mencoreng reputasi SS sebagai radio terbesar yang memanfaatkan online, medsos dan youtube.

Komitmen agar jurnalis fokus mencari berita yang akurat dan tajam dibuktikan dengan pemisahan antara redaksi dan marketing iklan. Namun faktanya tetap saja fungsi pengawasan pada jurnalis sangat lemah.

Jawa Pos adalah salah satu media yang tegas melarang jurnalisnya menerima apapun dari narasumber. Tidak ada alasan yang dapat dibenarkan ketika diketahui menerima gratifikasi. Sanksi pemecatan dengan tidak hormat langsung diberikan untuk jurnalis yang melanggar. Apabila tidak bisa menolak saat diberi gratifikasi, harus dilaporkan pada kantor. Selanjutnya oleh kantor akan dikembalikan pada narasumber. Seluruh jurnalis di Jawa Pos mengerti praktik gratifikasi tidak dapat ditolerir. Sayangnya, informasi yang peneliti terima menyebutkan sepanjang memiliki kedekatan dengan petinggi di Jawa Pos maka jurnalis yang menerima gratifikasi dapat terbebas dari sanksi apapun.

Bagi jurnalis yang terang-terangan menerima gratifikasi disertai bukti konkrit misalnya melalui transfer bank akan langsung dijatuhi sanksi pemecatan. Biasanya berawal berita yang ditulis wartawan tidak sesuai dengan harapan pemberi gratifikasi/narasumber atau malah tidak dimuat sama sekali. Narasumber kemudian akan melakukan komplain ke perusahaan, wartawan akan disidang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan observasi dan wawancara, peneliti menemukan beberapa rasionalitas yang dibangun oleh masing-masing informan. Sikap mengubah dari menolak gratifikasi menjadi menerima dilalui seiring dengan situasi dan kondisi di lapangan. Berikut uraian perbandingan rasionalitas dari keempat informan.

Melati berada di Radar Surabaya berstatus sebagai jurnalis baru. Ketika dihadapkan dengan budaya gratifikasi yang sangat kuat di kalangan jurnalis terlebih dilakukan oleh redaktur, ia tidak bisa menolak. Muncul rasa tidak nyaman jika menolak pemberian sang redaktur. Disamping mentor menulis, redaktur di media ini sekaligus berperan sebagai guru dalam budaya gratifikasi.

Posisi yang sulit pun dirasakan Melati, antara menerima namun menggadaikan idealisme atau menolak tapi dihadapkan pada rasa khawatir menyinggung, takut mendapatkan label sok suci dan berujung dalam pengasingan. Meski akhirnya menerima gratifikasi dari redaktur, ia merasa terpaksa, dilema dan dilecehkan. Perasaan tersebut muncul karena menurutnya jurnalis bekerja untuk mencari berita bukan untuk uang.

Berlanjut ketika awal pindah ke Tempo, Melati memang menolak uang dari narasumber/acara namun ia memilih menerima goodie bag berisi jaket. Artinya, gratifikasi dimaknai hanya uang, sedangkan gratifikasi dalam bentuk lain boleh diterima. Padahal sudah jelas dalam kode etik jurnalistik bahwa segala bentuk pemberian tidak boleh diterima.

Seiring berjalannya waktu dan intensitas interaksi dengan jurnalis di beberapa Pokja membuat sikap Melati berubah. Segala macam bentuk gratifikasi termasuk uang mulai diterima dengan alasan sumber pemberi tidak jelas karena menggunakan perantara sesama jurnalis. Alasan lain yang digunakan karena apabila tidak diterima, uang yang dari pemberi gratifikasi akan diambil oleh perantara dan tetap tercatat telah diambil oleh

Melati. Maka menurut Melati lebih baik uang itu diambil daripada diambil orang lain.

Saat ini, persepsi Melati mengenai gratifikasi adalah bagian dari rizeki yang tak disangka-sangka. Ia kemudian mengibaratkan dirinya seperti berdagang, ketika berangkat liputan belum tentu berita yang ditulis tayang, jika sedang tidak beruntung karya hasil liputan bisa saja tidak diterima dan tidak akan dibayar. Jadi apabila mendapatkan amplop itu adalah rizeki pengganti ketika berita tidak tayang di media.

Melati berpandangan bahwa gratifikasi di kalangan jurnalis tidak bisa dihindari. Sepanjang tidak mempengaruhi tulisan, tidak diketahui oleh kantor dan difasilitasi oleh Pokja, gratifikasi dapat diterima sebagai tambahan gaji.

Pengalaman berbeda dialami Fajar. Untuk mendapatkan informasi yang mendalam ikatan emosional dengan narasumber sangat dibutuhkan. Apalagi sedang mengerjakan jenis tulisan indept yang jarang diketahui publik dan media lain, maka dibutuhkan suasana akrab dan saling menghargai tanpa saling curiga. Saat diberi gratifikasi oleh narasumber dalam kondisi seperti itu, membuat Fajar berada dalam posisi yang membingungkan. Pertimbangan agar tidak menyakiti perasaan, menjadi salah satu alasan untuk berdamai dengan gratifikasi.

Fajar kemudian yakin bahwa narasumber yang memberi beragam jenis gratifikasi, tidak berniat mengintimidasi atau menyuap. Pemberian sengaja diberikan sebagai uang terima kasih atau uang transport.

Kebiasaan sebagian besar masyarakat/perusahaan pada umumnya apabila mengundang jurnalis selalu memberikan sejumlah uang. Sebagai wujud apresiasi karena telah diwawancarai.

Pertimbangan isu liputan juga menjadi perhatian jurnalis. Kasus dengan isu sensitif seperti persetujuan antara pemerintah dan swasta terkait pengelolaan pasar tradisional, lebih banyak dihindari apabila salah satu pihak menawarkan gratifikasi. Hal tersebut untuk menghindari terlibat jauh dalam pusaran konflik. Terlebih masih menjadi sengketa hukum yang melibatkan kepolisian, KPK dan BPK. Sebaliknya, ketika melakukan peliputan di acara yang bersifat serimonial, jurnalis lebih nyaman menerima gratifikasi.

Jika masa awal menjadi jurnalis hingga berencana menikah, kebutuhan materi cukup maka setelah menikah pemasukan dituntut semakin besar. Kondisi ini mengendorkan sikap pada gratifikasi. Persepsi idealisme yang dipahami Fajar berubah, selama tidak mempengaruhi tulisan seorang jurnalis boleh menerima gratifikasi.

Gratifikasi, kata Fajar, sudah menjadi budaya dan mengakar kuat, menerima secara terang-terangan tidak lagi menjadi hal tabu. Sebab telah terbiasa, jurnalis yang menerima tidak lagi memikirkan soal tulisan maupun kode etik jurnalistik. Praktik gratifikasi tetap berjalan dan setiap hari terus diulang-ulang tanpa merasa bersalah.

Alasan lain diungkapkan Dahlia. Gratifikasi dalam bentuk uang bagi Dahlia adalah bonus bulanan di luar gaji. Sah diterima selama tidak

membahayakan posisinya sebagai jurnalis di Jawa Pos. Ketika diberi amplop diterima langsung karena tidak ingin terjadi keributan dan rasa tidak nyaman dengan pihak pemberi. Terutama agenda yang dikoordinir oleh Pokja.

Keadaan tidak bisa menolak terbentuk saat terjalin hubungan baik dengan narasumber. Lebih dari sekedar kepentingan wawancara, ada ikatan emosional diantara jurnalis dan narasumber sehingga muncul perasaan tak kuasa menolak pemberian.

Selain itu, menerima gratifikasi melihat jenis liputan, acara-acara serimonial cenderung menerima gratifikasi karena tidak terlalu beresiko. Sedangkan isu-isu yang sensitif seperti kasus yang melibatkan pengadilan dan kepolisian lebih memilih menolak.

Paling menarik, bagi Awan gratifikasi hanya gaji tambahan, sepanjang tidak ada yang ditambahi dan dikurangi hal itu sah-sah saja diterima. Alasan menjaga hubungan baik dengan narasumber/instansi dan sekedar uang transport menjadi landasan menghalakan praktik tersebut. Gratifikasi sudah bukan sesuatu yang dianggap tabu justru memunculkan ketertarikan tersendiri. Selain dibayar oleh kantor, berita yang diproduksi juga dinilai uang oleh penyelenggara acara.

Selama bisa bekerja sesuai dengan kaedah jurnalistik dan menjaga netralitas meskipun menerima uang dan barang tidak bisa digolongkan sebagai suap. Selain itu, alasan lain tidak bisa dikatakan suap karena tidak ada hal yang disembunyikan saat memproduksi sebuah berita. Sebaliknya,

meski hanya menerima Rp 1 rupiah saja tapi tidak utuh dalam meliput bisa disebut sebagai suap. Gratifikasi menurut Awan adalah hal yang patut disyukuri.

Pokja memfasilitasi pemberian gratifikasi pada jurnalis tertentu yang diundang. Pemilihan jurnalis yang diundang berdasarkan permintaan panitia acara. Budaya gratifikasi yang begitu kuat, membuat Awan terbiasa dan merasa harus menerima gratifikasi karena tidak ingin dianggap berbeda dengan jurnalis lain.

Keempat informan pada akhirnya memilih menerima gratifikasi. Faktanya memang tidak semua jurnalis langsung menerima amplop, ada proses yang dilalui sehingga berubah dari anti gratifikasi kemudian berubah melunak, seperti jurnalis Tempo, SS dan Jawa Pos ketika awal menjadi jurnalis menolak dengan tegas segala bentuk gratifikasi. Sedangkan untuk jurnalis TV9, sejak dari awal ditugaskan memang sudah bersikap menerima gratifikasi tanpa pernah menolak.

Sikap menolak ditunjukkan dengan empat cara. Pertama, menolak secara halus yakni memuji pemberi dengan segala kebaikannya. Kedua, menolak secara tegas dan menyampaikan sikapnya secara langsung pada pemberi. Ketiga, ketika proses absen menerima gratifikasi, jurnalis menghindar atau pulang terlebih dahulu. Keempat, mengembalikan gratifikasi melalui kantor.

Diantara keempat informan, seluruhnya tetap memberi syarat untuk menerima gratifikasi. Dianataranya tidak diketahui oleh kantor, diberikan

konsensus di masyarakat melalui seperangkat peraturan perundang-undangan. Artinya, kelompok hegemon memanfaatkan negara untuk kepentingan kelompoknya sendiri dengan mengatasnamakan konsensus.

Batasan yang ketiga, masyarakat sipil (*civil society*), menurut Gramsci, berarti batasan yang menunjuk pada organisasi lain di luar negara dalam sebuah formasi sosial di luar bagian sistem produksi material dan ekonomi, yang didukung dan dilaksanakan oleh orang atau komponen di luar batasan di atas. Sebagai komponen utama masyarakat sipil dapat didefinisikan sebagai institusi relegius.

Berdasarkan konsep-konsep dalam hegemoni yang telah dijelaskan oleh Antonio Gramsci diatas, cara paling populer untuk mendapatkan uang selain dari gaji kantor media dalam dunia jurnalistik adalah dengan memanfaatkan profesi untuk mendulang gratifikasi. Hal ini disebut dengan konsep ekonomi dalam teori hegemoni. Akibat gratifikasi sikap jurnalis terbelah menjadi dua bagian, ada yang menerima ada pula yang menolak. Sebagai kelas dominan, jurnalis yang melakukan praktek gratifikasi berusaha mempengaruhi kelas minoritas yaitu jurnalis yang menolak gratifikasi.

Konsep negara diisi oleh Pokja. Pokja sebagai organisasi/komunitas yang sengaja dibentuk oleh jurnalis sesuai dengan pos liputan bidang tertentu dengan memanfaatkan kedekatan dengan narasumber. Mereka berusaha menguasai dan mempengaruhi jurnalis lain terutama yang menolak gratifikasi. Para elit pokja menggunakan jaringan dan kekuasaannya untuk menekan jurnalis non pokja untuk mematuhi aturan/konsensus yang berlaku di Pokja.

jurnalistik sehingga tidak perlu dipertentangkan. Pokja benar-benar berhasil melakukan penundukan ide, nilai, pemikiran terhadap jurnalis yang menentang praktik gratifikasi. Pada konteks ini, sesuai dengan apa yang dimaksud Gramsci dengan hegemoni menunjuk pada konsep penundukan pada pangkal *State Of Mind* seorang jurnalis.

Gramsci menyatakan bahwa bila kekuasaan hanya dicapai dengan mengandalkan kekuasaan memaksa, hasil nyata yang berhasil dicapai dinamakan dominasi. Stabilitas dan keamanan memang tercapai, sementara gejolak perlawanan tidak terlihat karena rakyat memang tidak berdaya. Namun hal ini tidak dapat berlangsung secara terus menerus, sehingga para penguasa yang benar-benar sangat ingin melestarikan kekuasaannya dengan menyadari keadaan ini akan melengkapi dominasi (bahkan secara perlahan-lahan kalau perlu menggantikannya) dengan perangkat kerja yang kedua, yang hasil akhirnya lebih dikenal dengan sebutan hegemoni. Dengan demikian supermasi kelompok (penguasa) atau kelas sosial tampil dalam dua cara yaitu dominasi atau penindasan dan kepemimpinan intelektual dan moral. Tipe kepemimpinan yang terakhir inilah yang merupakan hegemoni.³

Lebih lanjut, upaya mempengaruhi jurnalis yang menolak amplop terlihat ketika berada di lapangan. Setiap jurnalis selalu bertemu dengan jurnalis lain di pos liputan yang sama. Mereka berinteraksi satu dengan yang lain dan berkomunikasi tidak hanya persoalan pekerjaan namun juga hubungan pertemanan. Jurnalis juga tidak bisa mengindar dari Pokja karena

³ Heru Hendaro, *Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci : Dalam Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*, (Jakarta: Gramedia, 1993), 74.

seringkali sumber informasi agenda hanya disebar di kalangan anggota Pokja. Apabila ada jurnalis yang berada di sebuah pos liputan namun tidak mengikuti aturan dan budaya di Pokja maka tekanan segera diberikan. Mulai dari tidak mendapatkan informasi agenda liputan hingga dijauhi secara perlahan.

Pada titik ini, ada dua pilihan diplomatis bagi jurnalis, tidak mendapat info agenda yang berimbas pada kurangnya pendapatan dengan idealisme terjaga atau menurunkan idealisme dengan menerima gratifikasi namun bertentangan dengan batin. Sebagai jurnalis terutama yang masih baru, harus taat dan mengikuti seluruh aturan yang berlaku di Pokja. Pada akhirnya jurnalis memilih untuk melunak pada gratifikasi dan berusaha menjadi anggota Pokja.

Tidak semua jurnalis yang bisa masuk dalam lingkaran Pokja meski dari media *mainstream*. Ada proses yang harus dilalui jurnalis jika ingin berada dalam Pokja. Proses tersebut berkembang sesuai kesepakatan elite Pokja sehingga masing-masing Pokja memiliki mekanisme yang berbeda-beda. Keputusan layak atau tidaknya seorang jurnalis masuk menjadi anggota ditentukan oleh ketua Pokja.

Beberapa proses yang harus dilalui diantaranya tidak mendapatkan informasi agenda liputan, mendapat informasi liputan palsu dan dikucilkan saat peliputan. Setelah melalui proses tersebut, jurnalis yang berniat masuk Pokja akan diundang bergabung di grup whatsapp. Selain sebagai silaturahmi sesama jurnalis, whatsapp digunakan untuk sarana penyebaran informasi agenda liputan dan menguatkan solidaritas sesama jurnalis.

Sesama anggota Pokja semakin erat ikatan emosional dengan saling bertukar berita apabila ketinggalan acara atau sedang sepi isu sudah biasa dilakukan. Pokja pada umumnya memiliki seorang ketua kelas. Dia yang akan mengorganisir seluruh informasi dan gratifikasi jika ada instansi/perusahaan yang ingin mengundang jurnalis.

Pokja melalui ketua kelas yang mengkoordinir pembagian amplop begitu terasa. Selain amplop, ketua kelas juga berusaha membangun kedekatan dengan jurnalis dengan membayarkan makan. Kedekatan yang dibangun ketua kelas dengan jurnalis juga dilakukan melalui media sosial (medsos). Saling melempar komentar apabila salah satu dari jurnalis yang memosting status atau foto. Ketua kelas terlihat berusaha mengayomi jurnalis agar ikatan emosional diantara keduanya terbangun.

Secara umum, gratifikasi lebih banyak diperoleh dari agenda yang disebar oleh jurnalis yang tergabung di dalam Pokja atau humas instansi/narasumber. Selain mendapatkan informasi agenda acara dari Pokja, jurnalis mendapatkan agenda liputan dari redaktur sebagai tugas yang harus dilaksanakan dan berdasarkan inisiatif sendiri untuk menemui narasumber. Cara terakhir dilakukan secara mandiri, mulai dari menghubungi narasumber, menentukan waktu dan tempat wawancara.

Proses menerima gratifikasi berawal dari jurnalis tiba di lokasi acara dan melakukan peliputan hingga acara usai. Humas/panitia acara bersiap di meja pintu keluar untuk melayani jurnalis absen satu per satu. Secara

bergantian jurnalis mengantre untuk membubuhkan tanda tangan khusus untuk rekan media yang datang meliput.

Panitia menggunakan kertas berkarbon (NCR) untuk mengelabui jurnalis yang menolak gratifikasi. Lembaran absen yang terlihat awalnya hanya satu lembar, ternyata dibawahnya terdapat absen kedua yang memuat daftar penerima gratifikasi. Namun adapula panitia yang secara terang-terangan menjelaskan bahwa absen yang harus diisi jurnalis adalah sebagai bukti penerimaan gratifikasi.

Usai mengisi absen, panitia memberikan gratifikasi yang telah dipersiapkan sebelumnya. Gratifikasi pada umumnya uang yang telah dikemas dalam bentuk amplop. Jika ada tambahan, goodie bag berisi berbagai aksesoris dan perlengkapan juga diberikan pada jurnalis. Sebagian panitia/humas sengaja menyembunyikan amplop di bagian yang sulit dijangkau agar tidak terlihat oleh khalayak umum.

Selain itu, pemberian amplop bisa diberikan langsung oleh narasumber pada jurnalis saat berjabat tangan usai wawancara. Cara ini biasanya digunakan jurnalis ketika liputan khusus bersama narasumber. Situasi saat pemberian lebih privat, tidak diketahui oleh publik. Selanjutnya, jurnalis akan mengecek jumlah uang di amplop dan jenis barang yang ada di dalam goodie bag.

Apabila sudah menerima, beberapa saat kemudian jurnalis yang berperan sebagai ketua kelas menanyakan link berita untuk memastikan

Jurnalis yang memutuskan menolak gratifikasi akan menghindar dari prosesi absen/tanda tangan di meja panitia. Sesaat sebelum tanda tangan langsung meninggalkan lokasi acara atau menolak secara halus dengan memuji pemberi gratifikasi. Adapula jurnalis yang menolak dengan berusaha menjelaskan bahwa profesi jurnalis adalah pekerjaan mulia sehingga tidak bisa disuap dengan berbagai macam bentuk gratifikasi.

Apabila dalam kondisi terpaksa menerima, jurnalis masih tetap menghindar dari gratifikasi dengan cara mengikuti skema pengembalian gratifikasi melalui kantor perusahaan media. Secara resmi menggunakan kop surat media, gratifikasi akan dikirim kembali pada pemberi gratifikasi disertai imbauan agar tidak mengulanginya kembali.

Opsi lain ketika menolak adalah dengan menyumbangkan hasil gratifikasi pada yayasan/masjid atau orang yang membutuhkan. Nota sumbangan kemudian diisi atas nama pemberi gratifikasi. Jika memungkinkan dapat nota sumbangan diserahkan pada pemberi gratifikasi.

Pada saat-saat tertentu agenda Tbt bisa saja bocor di kalangan jurnalis umum. Meski tak diundang oleh ketua kelas atau humas instansi penyelenggara, beberapa jurnalis nekat datang karena tertarik dengan fasilitas gratifikasi. Keadaan seperti ini di lapangan memunculkan faksi-faksi, antara jurnalis yang diundang secara resmi dan jurnalis yang tidak diundang. Perlakuan humas pada jurnalis yang tidak diundang cenderung berbeda, seringkali harus pulang dengan tangan hampa sedangkan jurnalis yang diundang secara resmi akan mendapat fasilitas gratifikasi dengan paket lengkap.

Agenda yang berlabel Tbt lebih banyak disebar secara rahasia dan diam-diam. Hanya jurnalis tertentu sesuai permintaan penyelenggara acara atau hak prerogatif ketua kelas yang akan diundang. Pada level ini, Melati merasa perlu mengubah cara pandang dan menurunkan idealisme disesuaikan dengan budaya umum yang berlaku di lingkungan Pokja ekbis. Tidak ada jaminan jurnalis media mainstream seperti Tempo akan diundang, apabila tidak berbaur tetap dikucilkan.

Skema penyebaran undangan jenis Tbt dari ketua kelas terdapat dua cara. Ketua kelas mengirim undangan Tbt langsung ke jurnalis, tentu jumlahnya terbatas. Cara kedua yaitu ketua kelas mengirim pada beberapa orang kepercayaannya di Pokja kemudian disebar lagi pada jurnalis yang dituju. Cara terakhir sengaja dilakukan untuk memutus jejak sumber pemberi gratifikasi.

Gratifikasi yang diterima oleh jurnalis sangat beragam. Bentuk gratifikasi yang paling sering diterima adalah amplop. Selain praktis dan mudah dibawa, amplop relatif lebih disukai oleh jurnalis karena berbentuk uang tunai sehingga bisa difungsikan untuk membeli sesuatu sesuai kebutuhan. Bentuk lainnya, yaitu traktir makan, voucher belanja, voucher makan, goodie bag berisi kalender, block note, topi, kaos, flash disk, alat-alat elektronik seperti power bank dan speaker dan pulsa.

Apabila menolak gratifikasi, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu narasumber akan mengirim pulsa. Ketika ditanya, narasumber tersebut tidak mengakuinya. Selain itu, pengiriman gratifikasi melalui transfer bank sangat dihindari karena mudah dilacak dan menjadi alat bukti apabila ada pihak yang melaporkan pada perusahaan.

Rata-rata amplop yang diterima berisi uang senilai Rp 150.000 sampai Rp 200.000. Sedangkan nilai terkecil yaitu Rp 50.000 dan terbesar senilai Rp 1.300.000. Jumlah nilai amplop yang diterima sesuai dengan peran dan acara. Semakin penting peran seperti menjadi ketua kelas maka dipastikan uang yang diterima semakin besar. Begitu pula acara yang sifatnya nasional dan internasional akan disiapkan amplop khusus.

Praktik gratifikasi ternyata tidak hanya disuburkan oleh kalangan jurnalis sendiri. Peneliti menemukan bahwa ada pula media yang justru menginisiasi gratifikasi yaitu media Radar Surabaya. Meskipun tidak secara langsung memperbolehkan praktik tersebut, namun langkah pimpinan redaksi mengimbau jurnalis mencari iklan saat peliputan bagian dari upaya mengurus

idealisme dan mengarah pada budaya gratifikasi, terlebih untuk jurnalis pemula.

Intervensi redaksi pada jurnalis agar saat meliput bisa memanfaatkan peluang iklan cukup kuat. Orientasi bisnis dalam perusahaan media hingga mengenyampingkan etika jurnalistik dan netralitas sangat terasa. Tawaran bonus dari kantor ketika berhasil menggaet perusahaan/narasumber untuk memasang iklan menjadi hal yang menggiurkan. Terutama bagi jurnalis yang membutuhkan uang tambahan karena gajinya tidak cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari.

Ada semacam saling berlomba antar jurnalis untuk mendapatkan iklan sebanyak-banyaknya, bahkan sudah menjadi pemahaman umum jika jumlah uang hasil mencari iklan lebih besar dibanding gaji hasil menulis.

Fakta menarik lain adalah bahwa di Radar Surabaya, redaktur yang harusnya menjadi penjaga nilai idealisme sekaligus mentor menulis justru menjadi koordinator gratifikasi atau ketua kelas di berbagai kesempatan liputan. Redaktur sekaligus guru dalam budaya gratifikasi.

Di TV9, tidak banyak upaya untuk mencegah jurnalisnya menerima gratifikasi. Larangan menerima pemberian berupa uang, barang atau fasilitas hanya sebatas imbauan lisan saja. Tidak ada fungsi pengawasan yang baik, meski tahu tentang praktik gratifikasi redaktur lebih banyak diam karena mengerti kondisi jurnalis saat meliput di lapangan.

Media Tempo sejak awal sudah memiliki aturan yang jelas bahwa jurnalis tidak boleh menerima pemberian dalam bentuk apapun. Ada tembok

pemisah yang membelah redaksi dan marketing sehingga cerita bahwa jurnalis mencari iklan atau jurnalis diperintah liputan untuk kepentingan iklan tidak pernah terjadi di Tempo.

Jurnalis benar-benar di tempatkan dalam posisi yang netral, tidak boleh ada intervensi dari manapun. Liputan-liputan yang dilakukan jurnalis Tempo selalu berpijak pada kode etik jurnalistik, berpihak pada kepentingan publik dan leading dalam berita korupsi. Apabila ada laporan atau diketahui dengan bukti jurnalis menerima pemberian maka sanksi pemecatan langsung diberikan.

Sebelum berangkat bertugas di lapangan, para jurnalis juga selalu diingatkan oleh redaktur agar tidak menerima apapun, bahkan diminta berhati-hati apabila mengisi absen dan membubuhkan tanda tangan. Ketika tanda tangan kehadiran harus dipastikan tidak ada uang sepeserpun yang diterima.

Tempo memberikan skema pengembalian lewat kantor apabila jurnalis tidak bisa mengembalikan gratifikasi dihadapan pemberinya secara langsung. Arahan yang pernah disampaikan redaktur Tempo, apabila mendapatkan undangan liputan dari humas instansi/perusahaan atau ketua kelas ada baiknya dihadiri. Upaya tersebut untuk menjaga nama baik Tempo dan hubungan dengan berbagai pihak. Namun tidak ada kewajiban menulis jika tidak ada sesuatu yang menarik dan memiliki manfaat bagi masyarakat luas.

Meski tidak ada aturan secara tertulis, Suara Surabaya (SS) melalui redaktur selalu mengingatkan agar berhati-hati dengan pemberian dari narasumber atau perusahaan. Nama basar SS berada dalam setiap perilaku

jurnalis, artinya menerima gratifikasi dapat mencoreng reputasi SS sebagai radio terbesar yang memanfaatkan online, medsos dan youtube.

Komitmen agar jurnalis fokus mencari berita yang akurat dan tajam dibuktikan dengan pemisahan antara redaksi dan marketing iklan. Namun faktanya tetap saja fungsi pengawasan pada jurnalis sangat lemah. Jurnalis SS masih bebas menerima gratifikasi di berbagai kesempatan dan narasumber.

Jawa Pos adalah salah satu media yang tegas melarang jurnalisnya menerima apapun dari narasumber. Tidak ada alasan yang dapat dibenarkan ketika diketahui menerima gratifikasi. Sanksi pemecatan dengan tidak hormat langsung diberikan untuk jurnalis yang melanggar. Apabila tidak bisa menolak saat diberi gratifikasi, harus dilaporkan pada kantor. Selanjutnya oleh kantor akan dikembalikan pada narasumber. Seluruh jurnalis di Jawa Pos mengerti praktik gratifikasi tidak dapat ditolerir.

Bagi jurnalis yang terang-terangan menerima gratifikasi disertai bukti konkret misalnya melalui transfer bank akan langsung dijatuhi sanksi pemecatan. Biasanya berawal berita yang ditulis wartawan tidak sesuai dengan harapan pemberi gratifikasi/narasumber atau malah tidak dimuat sama sekali. Narasumber kemudian akan melakukan komplain ke perusahaan, wartawan akan disidang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sayangnya, informasi yang peneliti terima menyebutkan sepanjang memiliki kedekatan dengan petinggi di Jawa Pos maka jurnalis yang menerima gratifikasi dapat terbebas dari sanksi apapun. Pada media ini, fungsi pengawasan terhadap praktek gratifikasi juga lemah, terbukti sejumlah jurnalis

ideologis antara elit ekonomis, politis dan intelektual yang berlangsung bersamaan dengan kengengan terhadap campur tangan massa dalam hidup bernegara. Demikian kelompok-kelompok hegemonis tidak mau menyesuaikan kepentingan dan aspirasi-aspirasi mereka dengan kelas lain dalam masyarakat. Mereka malah mempertahankan peraturan melalui transformasi penyatuan para pemimpin budaya politik sosial maupun ekonomi yang secara potensial bertentangan dengan Negara baru yang dicita-citakan oleh kelompok hegemonik.

Empat sumber yang menjadi informan peneliti relatif menunjukkan gejala yang sama. Ketika awal, ketiga jurnalis selain Awan, tegas menolak segala bentuk hingga seiring berjalannya waktu dan dihadapkan pada kondisi tertentu membuat sikap mereka berubah melunak. Proses hegemoni dari Pokja dan lingkungan jurnalis dengan berbagai cara kemudian mempengaruhi mindset mereka.

Dalam keadaan tersebut seluruh jurnalis berada dalam hegemoni merosot, apabila tidak ada tekanan dan pengaruh Pokja sesungguhnya mereka memilih menolak gratifikasi. Namun adanya kesempatan dan fasilitasi dari Pokja membuat pendirian jurnalis benar-benar goyah. Berkali-kali menghadapi hal yang sama di berbagai tempat liputan akhirnya mindset tentang gratifikasi berubah dan memilih menerima sebagaimana dilakukan oleh mayoritas jurnalis.

Semakin lama hidup dalam budaya gratifikasi pada titik tertentu mereka akan merasa nyaman dan sudah dianggap bagian tak terpisahkan dari

dunia jurnalistik. Maka muncullah istilah rizki yang tak disangka, gaji tambahan dan istilah lain untuk memantapkan keyakinan bahwa menerima gratifikasi tidak dilarang.

Situasi ini terus berkembang hingga naik satu tingkat ke kategori lebih tinggi yaitu hegemoni integral. Dimana jurnalis menunjukkan persetujuan secara total tanpa merasa bersalah sedikpun saat menerima gratifikasi. Tidak ada percikan penolakan dalam mindset, semua sepakat bekerjasama untuk kepentingan bersama.

Berikut perjalanan pengalaman tiap jurnalis dalam ruang rasionalitas masing-masing. Dinamika yang muncul menyertai proses perubahan sikap sesuai dengan penjelasan tingkatan hegemoni diatas.

Hegemoni dialami Melati justru dari oknum-oknum di ruang redaksi Radar Surabaya. Redaktur yang seharusnya mendidik, mengontrol dan mengawasi jurnalis agar memiliki kualitas tulisan yang layak baca di masyarakat justru menggunakan kekuasaannya untuk menjadi dalang gratifikasi.

Melati sebagai jurnalis baru yang awalnya memandang bahwa jurnalis tidak diperkenankan menerima apapun dari narasumber namun kemudian berubah menerima gratifikasi disebabkan oleh pengaruh tindakan redaktur. Hal ini sesuai dengan asumsi dasar Teori Hegemoni yang menyatakan bahwa kelompok dominan berusaha menguasai kelompok yang lain dengan menggunakan kepemimpinan intelektual dan moral secara konsensus.

Kondisi Melati ketika diberi gratifikasi berada dalam posisi yang sulit, antara menerima namun menggadaikan idealisme atau menolak tapi dianggap tidak kompak dan dilebeli sok suci. Meski akhirnya menerima gratifikasi dari redaktur, ia merasa terpaksa, dilema dan dilecehkan. Perasaan tersebut muncul karena menurutnya jurnalis bekerja untuk mencari berita bukan untuk uang.

Keputusan Melati menerima gratifikasi didahului dengan pembentukan logika-logika bahwa gratifikasi boleh dilakukan. Alasan yang sering digunakan yaitu karena semua jurnalis menerima gratifikasi, hanya pemberian semata dan cuma untuk transport. Secara tidak sadar, proses internalisasi nilai-nilai kelompok dominan dalam hal ini redaktur dilakukan secara perlahan, Melati akhirnya menyepakati bahwa gratifikasi boleh dilakukan, sesuai dengan pemahaman mayoritas jurnalis di lapangan dan dianggap sebagai kesepakatan bersama.

Cara yang dilakukan oleh redaktur sebagai kelompok dominan untuk menguasai Melati melalui sanksi dikucilkan dan dijauhi dari lingkungan jurnalis. Sebagai jurnalis baru, Melati merasa tidak nyaman dan khawatir menyinggung perasaan redaktur jika menolak gratifikasi. Metode mempengaruhi seperti ini disebut dengan tindakan dominasi atau dilakukan dengan paksaan. Selanjutnya, ketika Melati sudah melunak, redaktur berusaha melanggengkan dominasinya dengan cara-cara yang lebih halus seperti melalui pendekatan emosional.

Ketika awal pindah ke Tempo, dengan lingkungan yang berbeda membuat pemahaman Melati mengenai gratifikasi mengalami penyesuaian.

Tempo yang dikenal tegas menolak gratifikasi sementara Melati sebelumnya berada pada pemahaman gratifikasi boleh diterima membuat mindset beradaptasi. Melati memang menolak uang dari narasumber/acara namun ia memilih menerima *goodie bag* berisi jaket. Artinya, gratifikasi dimaknai hanya uang, sedangkan gratifikasi dalam bentuk lain boleh diterima.

Berjalannya waktu sering bersinggungan dengan jurnalis di beberapa Pokja membuat sikap Melati berubah total. Segala macam bentuk gratifikasi termasuk uang mulai diterima. Kali ini hegemoni dilakukan oleh Pokja jurnalis. Melati dihadapkan pada dua pilihan, menolak uang namun tidak mendapatkan informasi agenda liputan sehingga mengurangi pendapatan atau menerima uang dan mendapatkan informasi agenda liputan dengan pendapatan berkali lipat.

Kondisi demikian membentuk mindset Melati. Ia berpandangan bahwa gratifikasi di kalangan jurnalis tidak bisa dihindari namun bisa dikurangi. Sepanjang tidak mempengaruhi tulisan, tidak diketahui oleh kantor dan difasilitasi oleh Pokja, gratifikasi dapat diterima sebagai tambahan gaji.

Saat ini, persepsi Melati mengenai gratifikasi adalah bagian dari rizeki yang tak disangka-sangka. Ia kemudian mengibaratkan dirinya seperti berdagang, ketika berangkat liputan belum tentu berita yang ditulis tayang, jika sedang tidak beruntung karya hasil liputan bisa saja tidak diterima dan tidak akan dibayar. Jadi apabila mendapatkan amplop itu adalah rizeki pengganti ketika berita tidak tayang di media.

Modus pemberian gratifikasi menggunakan perantara sesama jurnalis sehingga membuat siapa pemberinya tidak jelas. Cara ini merupakan alasan Melati menerima gratifikasi. Perantara biasanya berlindung dibalik kalimat hanya menyampaikan amanah tanpa menyebut pemberi gratifikasi . Alasan lain yang digunakan karena apabila tidak diterima, uang yang dari pemberi gratifikasi akan diambil oleh perantara dan tetap tercatat telah diambil oleh Melati. Maka menurut Melati lebih baik uang itu diambil daripada diambil orang lain.

Pengalaman berbeda dialami Fajar. Sikap menolak ketika awal menjadi jurnalis tegas ditunjukkannya pada narasumber. Bahkan tidak segan mengembalikan gratifikasi secara langsung. Namun seiring berjalannya waktu melihat lingkungan jurnalis juga menerima gratifikasi, sikapnya berubah melunak dalam kondisi tertentu.

Misalnya, sedang mengerjakan jenis tulisan indept yang jarang diketahui publik dan media lain, maka dibutuhkan suasana akrab, kedekatan dan saling menghargai tanpa saling curiga. Saat diberi gratifikasi oleh narasumber, membuat Fajar berada dalam posisi yang cukup sulit. Pertimbangan agar tidak menyakiti perasaan narasumber dan menjaga hubungan tetap baik, menjadi salah satu alasan untuk berdamai dengan gratifikasi.

Pada titik ini, lingkungan jurnalis dengan praktik menerima gratifikasi yang dijumpai Fajar setiap hari berhasil mempengaruhi pendirian. Logika-logika menerima gratifikasi dibangun melalui obrolan informal saat

bercengkrama usai liputan. Sikap Fajar menerima gratifikasi dipengaruhi oleh lingkungan jurnalis dan narasumber yang menggunakan cara-cara halus atau dalam istilah teori hegemoni disebut persuasif.

Fajar yakin bahwa narasumber yang memberi beragam jenis gratifikasi, tidak berniat mengintimidasi atau menyuap. Pemberian sengaja diberikan sebagai uang terima kasih atau uang transport. Kebiasaan sebagian besar masyarakat/perusahaan pada umumnya apabila mengundang jurnalis selalu memberikan sejumlah uang. Sebagai wujud apresiasi karena telah diwawancarai.

Pertimbangan isu liputan juga menjadi perhatian Fajar. Kasus dengan isu sensitif seperti persetujuan antara pemerintah dan swasta terkait pengelolaan pasar tradisional, lebih banyak dihindari apabila salah satu pihak menawarkan gratifikasi. Hal tersebut untuk menghindari terlibat jauh dalam pusaran konflik. Terlebih masih menjadi sengketa hukum yang melibatkan kepolisian, KPK dan BPK. Sebaliknya, ketika melakukan peliputan di acara yang bersifat serimonial, jurnalis lebih nyaman menerima gratifikasi.

Kebutuhan yang semakin besar pasca menikah juga menjadi alasan menerima gratifikasi. Setelah berkeluarga pemasukan dituntut semakin besar. Kondisi ini mengendorkan sikap pada gratifikasi. Persepsi idealisme yang dipahami Fajar berubah, selama tidak mempengaruhi tulisan seorang jurnalis boleh menerima gratifikasi.

Menurut Fajar, gratifikasi sudah menjadi budaya dan mengakar kuat, menerima secara terang-terangan tidak lagi menjadi hal tabu. Sebab telah

terbiasa, jurnalis yang menerima tidak lagi memikirkan soal tulisan maupun kode etik jurnalistik. Praktik gratifikasi tetap berjalan dan setiap hari terus diulang-ulang tanpa merasa bersalah.

Sementara jurnalis berikutnya adalah Dahlia. Dia merupakan salah satu jurnalis yang menolak gratifikasi. Selain dilarang kantor media, gratifikasi juga bertentangan dengan pemahamannya. Pengamatan yang dilakukan oleh teman sesama jurnalis Jawa Pos dan melihat praktik gratifikasi di lapangan saat meliput perlahan namun pasti sikapnya berubah menerima. Namun tidak semua gratifikasi diterima, ada beberapa syarat yang dipenuhi. Misalnya jika berita tidak tayang maka narasumber berjanji untuk tidak melapor pada Jawa Pos.

Selain itu, menerima gratifikasi melihat jenis liputan, acara-acara serimonial cenderung menerima gratifikasi karena tidak terlalu beresiko. Sedangkan isu-isu yang sensitif seperti kasus yang melibatkan pengadilan dan kepolisian lebih memilih menolak.

Pengaruh hegemoni pokja dalam proses Dahlia memutuskan menerima gratifikasi sangat besar. Ketika diberi amplop diterima langsung karena tidak ingin terjadi keributan dan mempertimbangkan rasa tidak nyaman sesama jurnalis. Gratifikasi dalam bentuk uang bagi Dahlia adalah bonus bulanan di luar gaji. Sah diterima selama tidak membahayakan posisinya sebagai jurnalis di Jawa Pos.

Keadaan tidak bisa menolak terbentuk saat terjalin hubungan baik dengan narasumber. Lebih dari sekedar kepentingan wawancara, ada ikatan

emosional diantara jurnalis dan narasumber sehingga muncul perasaan tak kuasa menolak pemberian.

Berbeda dengan jurnalis lain diatas yang pernah menolak, sejak awal menjadi jurnalis, Awan memang memilih menerima gratifikasi. Hal ini didasarkan oleh lingkungan jurnalis. Budaya gratifikasi yang begitu kuat, membuat Awan terbiasa dan merasa harus menerima gratifikasi karena tidak ingin dianggap berbeda dengan jurnalis lain.

Selain itu, gaji yang belum mencukupi juga membuat Awan lebih bersemangat pada agenda-agenda yang menyediakan gratifikasi. Faktor kesejahteraan juga mempengaruhi sikapnya menerima gratifikasi.

Menurut Awan, gratifikasi hanya gaji tambahan, sepanjang tidak ada yang ditambahi dan dikurangi hal itu sah-sah saja diterima. Alasan menjaga hubungan baik dengan narasumber/instansi dan sekedar uang transport menjadi landasan menghalalkan praktik tersebut. Gratifikasi sudah bukan sesuatu yang dianggap tabu justru memunculkan ketertarikan tersendiri. Selain dibayar oleh kantor, berita yang diproduksi juga dinilai uang oleh penyelenggara acara.

Gratifikasi menurut Awan adalah hal yang patut disyukuri. Selama bisa bekerja sesuai dengan kaedah jurnalistik dan menjaga netralitas meskipun menerima uang dan barang tidak bisa digolongkan sebagai suap. Selain itu, alasan lain tidak bisa dikatakan suap karena tidak ada hal yang disembunyikan saat memproduksi sebuah berita. Sebaliknya, meski hanya menerima Rp 1 rupiah saja tapi tidak utuh dalam meliput bisa disebut sebagai suap.

Pola sikap yang ditunjukkan oleh keempat informan menunjukkan hal yang menarik. Tiga jurnalis yang awalnya menolak berubah menerima gratifikasi dengan beragam rasionalisasi. Sementara jurnalis TV9, memang sejak dari awal menerima gratifikasi.

Konsistensi memegang teguh kode etik jurnalistik dan nilai-nilai Islam dalam melaksanakan tugas jurnalistik tidak berjalan sempurna. Seiring berjalannya waktu dan semakin sering turun ke lapangan untuk melakukan liputan bersama jurnalis lain. Diantara keempat informan, seluruhnya tetap memberi syarat untuk menerima gratifikasi. Diantaranya tidak diketahui oleh kantor, diberikan melalui Pokja, bukan bagian dari liputan isu sensitif dan tidak mempengaruhi tulisan.

Pada umumnya semua jurnalis muslim paham dan mengerti bahwa praktik gratifikasi merupakan hal yang bertentangan dalam kode etik jurnalistik dan nilai-nilai agama Islam. Namun tetap melakukan praktik tersebut tanpa merasa bersalah.

Gratifikasi secara tegas dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Pasal 6 disebutkan bahwa “wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap”. Lebih jelas pada butir penafsiran dijelaskan. a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

NO	Nama Jurnalis	Sikap Awal	Sikap Akhir	Rasionalisasi	Peran Perusahaan	Tingkatan Hegemoni
1	Melati	Menolak	Menerima	<p>Radarsurabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Khawatir mendapat label sok suci dan dan merasa tidak nyaman jika menolak pemberian dari redaktur. Saat diberi gratifikasi sebetulnya merasa dilecehkan namun tak kuasa menolak. <p>Tempo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima gratifikasi dalam bentuk uang tidak boleh namun goodie bag berisi Jaket bisa di bawa pulang. 2. Pendapatan menurun jika tidak masuk Pokja dan mengikuti budaya gratifikasi. Karena kekurangan agenda liputan. 3. Gratifikasi di kalangan jurnalis tidak bisa dihindari namun bisa 	<p>Radarsurabaya</p> <p>Oknum Redaktur menjadi ketua kelas. Artinya ruang redaksi dan mayoritas jurnalis di media ini turut serta bersama-sama menyuburkan gratifikasi</p> <p>Tempo</p> <p>Sejak awal sudah ada aturan yang jelas bahwa jurnalis tidak boleh menerima pemberian dalam bentuk apapun. Apabila ditemukan bukti yang kuat sanksi pemecatan akan diberikan.</p> <p>Namun fungsi pengawasan masih sangat lemah.</p>	Hegemoni Merosot –Hegemoni Integral

				<p>dikurangi. Sepanjang tidak mempengaruhi tulisan, tidak diketahui oleh kantor dan difasilitasi oleh Pokja, gratifikasi dapat diterima sebagai tambahan gaji.</p> <p>4. Persepsi Melati mengenai gratifikasi adalah bagian dari rizeki yang tak disangka-sangka.</p>		
2	Fajar	Menolak	Menerima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor kedekatan dengan narasumber sehingga apabila menolak gratifikasi khawatir tersinggung. 2. Gratifikasi, tidak berniat mengintimidasi atau menyuap. Pemberian sengaja diberikan sebagai uang terima kasih atau uang transport. 3. Kebutuhan yang semakin besar pasca menikah menjadi alasan menerima gratifikasi. Setelah berkeluarga pemasukan 	<p>Meski tidak ada aturan secara tertulis, Suara Surabaya (SS) melalui redaktur selalu mengingatkan agar berhati-hati dengan pemberian dari narasumber atau perusahaan. Nama basar SS berada dalam setiap perilaku jurnalis.</p> <p>Fungsi pengawasan masih lemah.</p>	Hegemoni Merosot –Hegemoni Integral

				dituntut semakin besar.		
3	Dahlia	Menolak	Menerima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daripada dipaksa dan menimbulkan keributan lebih baik gratifikasi diterima . 2. Sepanjang tidak diketahui perusahaan media, gratifikasi boleh diterima 3. Gratifikasi adalah uang bonus diluar gaji 4. Menerima gratifikasi karena ingin menjaga hubungan baik dengan sesama Jurnalis di Pokja. Apalagi mayoritas jurnalis memang melakukan hal demikian. 	<p>Jawa Pos adalah salah satu media yang tegas melarang jurnalisnya menerima apapun dari narasumber. Tidak ada alasan yang dapat dibenarkan ketika diketahui menerima gratifikasi. Sanksi pemecatan dengan tidak hormat langsung diberikan untuk jurnalis yang melanggar.</p> <p>Apabila tidak bisa menolak saat diberi gratifikasi, harus dilaporkan pada kantor. Selanjutnya oleh kantor akan dikembalikan pada narasumber.</p> <p>Sayangnya, informasi yang peneliti terima menyebutkan sepanjang memiliki kedekatan dengan petinggi di Jawa Pos maka jurnalis yang menerima gratifikasi dapat terbebas dari sanksi apapun.</p> <p>Fungsi pengawasan lemah</p>	Hegemoni Merosot –Hegemoni Integral

4	Awan	Menerima	Menerima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selama bisa bekerja sesuai dengan kaedah jurnalistik dan menjaga netralitas meskipun menerima uang dan barang tidak bisa digolongkan sebagai gratifikasi. 2. Selain itu, gaji yang belum mencukupi juga membuat Awan lebih bersemangat pada agenda-agenda yang menyediakan gratifikasi. Faktor kesejahteraan juga mempengaruhi sikapnya menerima gratifikasi. 	<p>Tidak banyak upaya untuk mencegah jurnalisnya agar tidak menerima gratifikasi. Larangan menerima pemberian berupa uang, barang atau fasilitas hanya sebatas imbauan lisan saja.</p> <p>Fungsi pengawasan tidak berjalan, meski tahu tentang praktik gratifikasi redaktur lebih banyak diam karena mengerti kondisi jurnalis saat meliput di lapangan.</p>	Hegemoni Integral
---	------	----------	----------	---	--	-------------------